

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang mempunyai dinamika konflik luar biasa, berawal dari konflik internal yaitu konflik etnis dan berkembang menjadi konflik terbuka di negara tersebut. Konflik yang terjadi pada 2003¹ di Darfur, Sudan merupakan suatu bencana kemanusiaan, di mana konflik ini dipicu oleh kelompok-kelompok pemberontak yang menyerang fasilitas-fasilitas umum dan merambah kepada konflik terbuka dengan pemerintah Sudan. Kelompok pemberontak Sudan Liberation Army (SLA) ini menganggap bahwa pemerintah Sudan hanya menguntungkan kelompok dari warga Arab yang ada di Sudan dan mengeksploitasi warga asli keturunan Afrika yang ada di Sudan.²

Konflik di Darfur ini merupakan salah satu rangkaian konflik etnis yang terjadi di Sudan.³ Kelompok Sudan Liberation Army kemudian menyerang markas pemerintahan di Golo, Jabel Marra. Penyerangan ini ditujukan agar pemerintah Sudan berlaku adil kepada seluruh warganya terutama dalam permasalahan ekonomi karena selama ini warga Sudan mengalami kemiskinan dan kelaparan akibat sumber daya yang dikelola oleh pemerintah hanya menguntungkan pemerintah dan milisi Janjaweed.⁴

Beberapa upaya untuk menanggulangi dan mengakhiri konflik ini telah dilakukan melalui beberapa operasi perdamaian oleh African Union melalui

¹ Abdul Hadi Adnan, "Penyelesaian Sudan Selatan dan Krisis Darfur". *Jurnal UNPAS*, (2006)

² Michael Clough, "Darfur; Whose Responsibility to Protect?". *Human Right Watch*, (2007): hal.3

³ Ottaway, Marina and Mai, El-Sadany, "Sudan: From Conflict to Conflict", *The Carnegie Papers*, (2012)

⁴ Michael Clough, (2007): hal 3

African Union Mission in Sudan (AMIS). Namun misi ini tidak berjalan secara efektif, sehingga melalui United Nation Mission In Sudan (UNMIS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut serta dalam mengupayakan *peacekeeping* di Sudan. Melalui UNMIS, konflik ini berhasil diredam dengan menghasilkan Comprehensive Peace Agreement (CPA) pada tahun 2005 yang disepakati oleh Sudan Liberation Army dan pihak Pemerintah Sudan⁵. Comprehensive Peace Agreement ini memuat tentang *power sharing*, pembagian sumber daya, resolusi konflik di Darfur, resolusi konflik antara South Kordofan dan *Blue Nile*, juga tentang keamanan dan genjatan senjata.⁶ Walaupun demikian, misi yang dijalankan oleh PBB ini tidak berjalan dengan baik, karena adanya penyerangan dan juga konflik yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, PBB dan African Union sepakat untuk membentuk suatu misi gabungan yang diberi nama United Nations-African Union Hybrid Operation Mission In Darfur (UNAMID) pada tahun 2007.⁷

Tetapi CPA hanya mampu meredam konflik untuk sementara waktu dan membuat pergolakan kembali terjadi, hingga akhirnya pada tahun 2010 lahir referendum pemisahan diri antara Sudan dan Sudan Selatan. Referendum yang diinisiasi oleh *Southern Sudan Referendum Commission* ini, didasari oleh adanya CPA, yang menganggap bahwa adanya CPA adalah suatu bentuk dari masyarakat Sudan Selatan untuk menentukan nasibnya sendiri.⁸ Referendum ini dilakukan pada 9-15 Januari 2011, setidaknya sebanyak 3.9 juta orang di wilayah Sudan

⁵ Jaïr van der Lijn, *Success and Failure of UN Peacekeeping Operations: UNMIS in Sudan*, (2010): hal. 28

⁶ *UN Mission in Sudan, The Comprehensive Peace Agreement*, (2005), diakses melalui <https://peacemaker.un.org/node/1369> pada 13 Oktober 2019

⁷ Unamid Fact Sheet, *Protecting civilians, facilitating humanitarian aid & helping political process in Darfur*, diakses melalui <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unamid> pada 23 maret 2019

⁸ Putri Cahyani, "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan", *Journal of International Relations*, no.3, (2017): hal.87

Selatan menginginkan untuk memisahkan diri dan memilih untuk merdeka dari wilayah Sudan⁹ hingga akhirnya Sudan Selatan merdeka dan menjadi negara ke-193 di PBB.

Melihat kondisi yang terjadi di Sudan Selatan, Dewan Keamanan PBB melalui mandat resolusi no. 1996 pada tahun 2011 menyatakan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan dapat menjadi ancaman bagi proses perdamaian dan keamanan di wilayah Sudan, sehingga akhirnya melalui mandat tersebut PBB membentuk United Nation Mission in South Sudan (UNMISS). Sebanyak 7.000 personel militer, termasuk perwira dan staf militer, hingga 900 personel polisi sipil, termasuk tim keahlian investigasi HAM teknis, dengan dukungan dana sebesar USD 738,266,500 dimandatkan oleh DK PBB untuk menjalankan misi ini, dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan.¹⁰ Dengan mandatnya, UNMISS sepenuhnya mendukung pemerintahan Sudan Selatan dalam upaya membangun negara (*state-building*). Misi yang diemban oleh UNMISS ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mendukung pemerintahan baru dalam konsolidasi perdamaian, mendorong pembangunan negara dan ekonomi, pencegahan konflik, mitigasi, resolusi, dan perlindungan warga sipil, membangun kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor kemanan dan keadilan di Sudan Selatan.¹¹

Tetapi dalam pelaksanaannya UNMISS dihadapkan dengan adanya konflik yang kembali terjadi pada tahun 2013¹² di Sudan Selatan, di mana konflik ini

⁹ Sudan Referendum Fact Sheet, *UN Peace Keeping*, (2011)

¹⁰ United Nation Security Council, *Resolution 1996*, (2011)

¹¹ Stamnes, E., "The United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS): Protecting Civilians in a Volatile Environment". *Norwegian Institute of International Affairs*, (2015) hal. 3

¹² Lauren Ploch Blanchard, "Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead", *Congressional Research Service*, (2016)

terjadi akibat adanya perebutan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar. Kelompok Sudan People's Liberation Movement yang merupakan pengikut setia dari Presiden Salva Kiir dan juga tentara dari Pemerintah Sudan Selatan menganggap ada indikasi upaya kudeta yang dilakukan oleh Wakil Presiden Riek Machar dan pengikutnya kepada pemerintah. Namun sebaliknya, Riek Machar menganggap bahwa Presiden Salva Kiir tidak bisa membawa Sudan Selatan menjadi lebih stabil setelah adanya referendum, dan melakukan penyerangan kepada barak pengawalan Presiden Salva Kiir di Juba, Sudan Selatan.

Dalam upayanya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Sudan Selatan, UNMISS dibantu dengan Intergovernmental Authority on Development yang merupakan salah satu NGO yang bergerak dalam pembangunan daerah tertinggal di Afrika, langsung bertindak cepat dalam mencegah konflik ini dengan mengadakan perundingan kepada kedua belah pihak. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan *Compromise Agreement on the Resolution of the Conflict in the South Sudan* yang ditandatangani oleh pihak Salva Kiir dan Riek Machar.¹³ Kesepakatan ini lebih merujuk kepada *power sharing*, gencatan senjata, pelucutan senjata dan juga rekonstruksi serta meresolusi konflik yang telah terjadi dan harus dilakukan oleh pihak Salva Kiir dan Riek Machar. Namun, kesepakatan ini dilanggar oleh pihak Salva Kiir dengan melucuti minyak yang dibawa oleh UNMISS dan menyandera 18 tentara UNMISS.

Upaya *peacebuilding* yang dilakukan oleh UNMISS kembali mengalami hambatan, dikarenakan konflik perebutan kilang minyak yang ada di daerah Unity,

¹³ Cahyanti, Putri, "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan", *Journal of International Relations*, vol. 3, no. 4, (2017): hal. 89

Sudan Selatan yang dilakukan oleh pihak Riik Machar karena menganggap pihak pemerintah mengambil keuntungan dari penjualan minyak untuk membeli senjata.¹⁴ Konflik dan pemberontakan yang terjadi akibat perebutan kilang minyak ini melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. Selain itu, hambatan juga terjadi akibat adanya penyerangan terhadap *camp* UNMISS yang mengakibatkan dua orang personil UNMISS meninggal dunia dan setidaknya 20 orang pengungsi yang berada di *camp* tersebut luka-luka.¹⁵

Selain itu, muncul tuduhan bahwa PBB melalui UNMISS berpihak kepada pemerintah Sudan Selatan, sehingga menyebabkan adanya demonstrasi anti PBB yang dilakukan oleh masyarakat pendukung Riik Machar. Para personil UNMISS juga mendapatkan gangguan dan dihalang-halangi saat melakukan misinya oleh beberapa kelompok pemberontak. Rumitnya pelaksanaan misi yang dilakukan oleh UNMISS dengan berbagai dinamikanya, peneliti kemudian akan melihat bagaimana UNMISS berupaya dalam menjalankan mandat *peacebuilding*.

1.2 Rumusan Masalah

Pembentukan UNMISS oleh DK PBB melalui mandatnya pada tahun 2011 merupakan salah satu upaya untuk membendung dan menyelesaikan konflik serta ketegangan yang terjadi di Sudan Selatan. Dalam pelaksanaan mandatnya, UNMISS menghadapi berbagai tantangan dan ancaman karena fluktuatifnya eskalasi konflik yang terjadi. Konflik terjadi dimulai dari pelanggaran perjanjian terkait gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Salva Kiir, perebutan kilang

¹⁴VOA Indonesia, *Pemberontak Sudan Selatan Kuasai Kota Minyak Utama*, (2014), diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pemberontak-sudan-selatan-kuasai-kota-minyak-utama/1894270.html> pada 25 Maret 2019

¹⁵ *UN Based Attack: Two Peacekeepers Killed*, (2013), diakses melalui <https://www.enca.com/africa/un-base-attacked-two-peakeepers-killed> pada 25 Maret 2019

minyak di daerah *Unity*, serta aksi demonstrasi anti PBB yang dilakukan oleh pihak Riik Machar yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap pasukan UNMISS. Hal tersebut ditunjukkan dengan dihalang-halangnya aktivitas yang dilakukan oleh pasukan UNMISS selama bertugas. Tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh UNMISS selama menjalankan mandatnya di Sudan Selatan dinilai sebagai hal penting untuk melihat bagaimana UNMISS bekerja dalam menjalankan mandatnya untuk menyelesaikan konflik di Sudan Selatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, dengan demikian dapat ditarik pertanyaan penelitian: Bagaimana upaya UNMISS dalam melakukan *peacebuilding* di Sudan Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh UNMISS dalam membendung dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Sudan Selatan berdasarkan mandat yang telah diberikan oleh DK PBB.

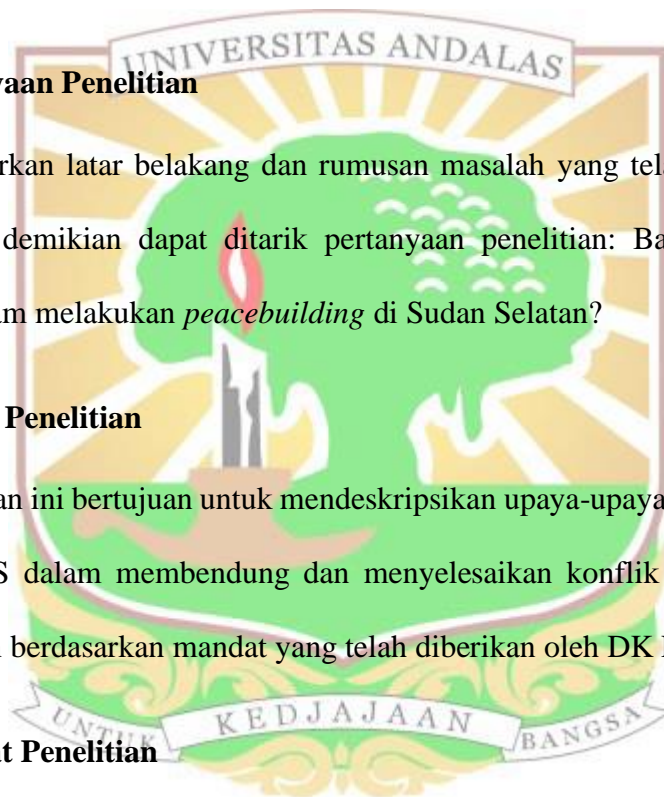
1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional terutama dalam konteks upaya *peacebuilding* yang dilakukan oleh DK PBB melalui UNMISS.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan pembaca untuk memahami lebih baik konflik yang terjadi di Sudan Selatan dan upaya yang



dilakukan oleh UNMISS dalam membendung dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

1.6 Studi Pustaka

Untuk mengembangkan penelitian ini maka digunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi tersebut dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur untuk membantu analisis yang dilakukan dengan melihat relevansi dan komparasinya terhadap topik penelitian.

Pertama, tulisan dari Lauren Ploch Balnchard yang berjudul “*Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead*”.¹⁶ Dalam tulisan ini, dijelaskan bagaimana Sudan Selatan yang pada 2011 merupakan negara baru di dunia dan negara yang sangat rentan akan ketidakstabilan negaranya berusaha untuk mencapai apa yang mereka inginkan ketika melakukan referendum kemerdekaan dari Sudan. Dalam penelitian ini juga digambarkan bagaimana pada akhirnya perang sipil yang terjadi di Sudan telah memakan korban sebanyak 2,5 juta orang meninggal dunia, dan setidaknya 4,5 juta orang mengalami luka-luka.¹⁷ Konflik yang terjadi dalam penelitian ini sangatlah fluktuatif dan yang menjadi konflik paling besar adalah konflik kepentingan antara Presiden Salva Kiir dan Wakil

¹⁶ Lauren Ploch Blanchard, “Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead”, *Congressional Research Service*, (2016)

¹⁷ Lauren Ploch Blanchard, “Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead”, *Congressional Research Service*, (2016): hal. 5

Presiden Riek Machar, yang pada akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan di Sudan Selatan. Hal ini dikarenakan kedua orang tersebut merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh serta pengikut yang sangat besar di Sudan Selatan. Penelitian ini juga membahas tentang salah satu upaya untuk meredam konflik dengan adanya UN Peacekeeper dan adanya *peace agreement* yang akan membantu dalam meredam konflik di Sudan Selatan. Tulisan ini berkontribusi pada pemberian gambaran eskalasi konflik yang terjadi di Sudan Selatan dan juga membantu peneliti dalam mendapatkan data terkait hal-hal yang dapat memberikan dampak terhadap upaya *peacebuilding* yang dilakukan oleh UNMISS.

Referensi kedua adalah, *Post-referendum South Sudan; Political Violence, New Sudan, and Democratic Nation-Building* oleh Christopher Zambakari¹⁸. Artikel ini menganalisis permasalahan setelah referendum Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2009 dan 2011. Artikel ini menganalisis permasalahan setelah referendum Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2009 dan 2011. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai CPA yang kemudian dapat mengakhiri perang sipil di Sudan yang juga merupakan terpanjang di Afrika sejak tahun 1955. Terdapat konflik yang dapat mengganggu kestabilan pascareferendum yaitu konflik antara ras Arab dan Afrika, serta adanya dua agama yang dominan di Sudan Selatan yang cenderung dapat memicu konflik. Selain itu, dalam artikel ini juga digambarkan konflik-konflik yang akan terjadi, seperti konflik kepentingan politik, konflik perebutan sumber daya, dan konflik antargolongan.

¹⁸ Christopher Zambakari, "Post-referendum South Sudan; Political Violence, New Sudan, and Democratic Nation-Building", *The Georgetown Public Policy Review*, 2013.

Artikel ini juga menjelaskan pentingnya *democratic nation-building* sebagai upaya dari Sudan Selatan untuk tetap menjaga kestabilan negaranya. Pentingnya hal ini juga sebagai upaya untuk menata sebuah negara yang baru saja merdeka untuk tetap dapat bertahan dalam menjalankan negaranya. Tulisan ini berkontribusi pada topik penelitian untuk mendukung argumen bagaimana keadaan di Sudan Selatan yang berpengaruh pada upaya yang dilakukan oleh UNMISS.

Ketiga adalah tulisan dari Christopher Zambakari, Tarnjeet K. Kang, and Robert A. Sanders, dalam penelitiannya yang berjudul *The Role of UN Mission in South Sudan (UNMISS) in Protecting Civilians*.¹⁹ Dalam tulisan ini, dijelaskan bagaimana UNMISS menerima mandat dari PBB sebagai upaya *peacebuilding* di Sudan Selatan setelah kemerdekaannya. Sebelumnya, PBB juga telah memandatkan suatu misi yang bernama UN Mission in Sudan (UNMIS), yang memiliki fokus untuk menanggulangi dan mencegah konflik di Sudan. Namun, misi ini gagal karena adanya referendum yang mengakibatkan Sudan Selatan memutuskan untuk merdeka dari Sudan. Dalam menjalankan misinya berdasarkan mandatnya, UNMISS memiliki tugas untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil, serta membantu menjaga kestabilan negara. Hal yang menjadi salah satu poin utama tugas UNMISS adalah perlindungan warga sipil sebagai bentuk upaya *peacebuilding* yang nantinya akan berpengaruh terhadap resolusi konflik di Sudan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis dalam memberikan gambaran dari salah satu upaya *peacebuilding* yang dilakukan oleh UNMISS.

¹⁹ Christopher Zambakari, Tarnjeet K. Kang, dan Robert A. Sanders, *The Role of UN Mission in South Sudan in Protecting Civilians*, (2018): hal. 98

Keempat, tulisan berjudul *Contextualising Liberal peacebuilding for Local Circumstances: UNMISS and Local peacebuilding In South Sudan*²⁰, karya dari Diana Felix da Costa dan John Karlsud. Dalam tulisan ini, *peacebuilding* awalnya didefinisikan pada tahun 1992 oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali sebagai “Tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang cenderung memperkuat dan memantapkan perdamaian untuk menghindari muncul kembalinya konflik.” Selain itu *peacebuilding* juga diartikan sebagai upaya intervensi dari pihak eksternal yang dimaksudkan untuk mengurangi resiko konflik yang ada di suatu negara. Pihak internal juga memiliki peran penting dalam membangun perdamaian dan terkadang pihak internal melihat pihak eksternal yang berupaya meredam konflik sebagai ancaman.

Dalam tulisan ini juga dijelaskan bagaimana CPA yang menjadi landasan referendum Sudan Selatan dianggap sebagai ancaman, karena setelah referendum ketegangan konflik melebar menjadi konflik internal Sudan Selatan. UNMISS memiliki rencana untuk hadir di tingkat daerah melalui *Country Support Base* (CSB), yang dipilih sesuai dengan tingkat konflik dan isolasi dalam upaya untuk mendukung perluasan otoritas negara dan membangun kapasitas nasional untuk memungkinkan pemberian layanan di tingkat lokal sebagai upaya untuk melakukan *peacebuilding* di Sudan Selatan. Tulisan ini berkontribusi dalam membantu penulis untuk mendapatkan data terkait salah satu upaya yang telah dilakukan UNMISS, data dari tulisan ini nantinya dikomparasikan oleh penulis dalam meneliti upaya *peacebuilding* yang dilakukan UNMISS.

²⁰ Diana Felix da Costa dan John Karlsud, “Contextualising Liberal *peacebuilding* for Local Circumstances: UNMISS and Local *peacebuilding* In South Sudan”, *Journal of peacebuilding and Development*,(2013): hal, 55

Kelima, tulisan dari Ray Murphy yang berjudul *The United Nations Mission in South Sudan and the Protection of Civilians*.²¹ Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana *United Mission In Sudan* (UNMIS) gagal dalam mengemban tugasnya sebagai *peace operation*. Landasan UNMIS disebut gagal oleh Murphy dikarenakan adanya CPA yang diharapkan menjadi titik balik perdamaian di Sudan malah menyebabkan Sudan Selatan merdeka. Lalu, hadirnya UNMISS sebagai upaya untuk meredam konflik yang dapat terjadi di Sudan Selatan sebagai mana mandate DK PBB. Artikel ini meneliti operasi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan dan mandat *Protecting of Civilians* (PoC).

Dalam melakukan tugasnya UNMISS mengevaluasi mandat UNMIS sebelumnya. Meskipun memiliki kewajiban hukum pada dasarnya, UNMISS telah menjadi bagian dari pola dalam operasi pemeliharaan perdamaian dalam menghindarinya penggunaan kekuatan Militer. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana UNMISS bertugas dalam menjalankan mandat *protecting of civilians* di Sudan Selatan. Sampai tahun 2016 UNMISS telah memberikan suaka kepada masyarakat Sudan Selatan, sebanyak 160.000 pengungsi telah berhasil UNMISS tampung di *camp-camp* markas UNMISS.²²

Dalam tulisan ini, peneliti menemukan adanya kesamaan dan perbedaan terkait topik yang dibahas. Kesamaannya dapat dilihat melalui salah satu upaya yang dilakukan oleh UNMISS yaitu perlindungan warga sipil, perbedaannya adalah tulisan ini lebih berfokus bagaimana UNMISS melakukan perlindungannya

²¹ Ray Murphy, "The United Nations Mission in South Sudan and the Protection of Civilians", *Journal of Conflict & Security Law*, (2017): hal. 368

²² Ray Murphy, hal. 373

terhadap warga sipil, sehingga tulisan ini juga dapat berkontribusi dengan memberikan gambaran teknis perlindungan warga sipil UNMISS.

1.7 Kerangka Konsep

1.7.1 *Peacebuilding*

Konflik merupakan suatu hal yang lazim terjadi di dunia, namun pasca konflik merupakan suatu hal yang harus menjadi fokus untuk segera diselesaikan. Manajemen resolusi konflik merupakan suatu poin penting yang harus dilakukan untuk mencapai perdamaian yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Dalam melakukan resolusi konflik, dibutuhkan mekanisme yang tidak hanya mampu untuk mencegah perang dapat kembali terjadi, tapi juga untuk menyelesaikan akar dari suatu permasalahan konflik dan mencegah konflik tidak terjadi lagi.

Peacebuilding merupakan suatu konsep yang didasari oleh pemikiran Johan Galtung pada tahun 1975, yaitu suatu cara untuk mempromosikan perdamaian berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab konflik kekerasan dan mendukung kapasitas masyarakat untuk manajemen perdamaian dan resolusi konflik.²³ *Peacebuilding* juga dapat dipahami sebagai konsep komprehensif yang meliputi, menghasilkan dan menopang berbagai proses pendekatan, serta tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik ke arah hubungan berkelanjutan yang damai. Istilah ini dengan demikian melibatkan berbagai kegiatan yang meliputi perjanjian perdamaian. Perdamaian dilihat tidak hanya sebagai tahap dalam waktu atau kondisi, melainkan konstruksi sosial yang dinamis, *peacebuilding* juga mengedepankan cara yang persuasif untuk dilakukan dalam manajemen suatu

²³ Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and *peacebuilding*," *Peace, War and Defense: Essays in Peace Research*, vol. 2, (1976): 297

konflik yang telah terjadi. Selain itu, *peacebuilding* juga berupaya untuk menghindari kontak fisik secara langsung.

Peacebuilding juga sempat menjadi pembahasan dalam *An Agenda for Peace* tahun 1992, yang mana pada agenda tersebut terdapat pemahaman tentang *peacebuilding* yang memiliki tiga area, di antaranya *gender-based violence*, pemberdayaan dan pembangunan.²⁴ Dalam agenda ini mantan Sekretaris Jendral PBB pada tahun 1992, Bhoutros-Bhoutros Ghali, juga mendefinisikan *peacebuilding* sebagai :

“comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to consolidate peace and advance a sense of confidence and well-being among people. Through agreements ending civil strife, these may include disarming the previously warring parties and the restoration of order, the custody and possible destruction of weapons, repatriating refugees, advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening governmental institutions and promoting formal and informal processes of political participation”.

Untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, proses *peacebuilding* harus didasarkan tidak hanya pada perjanjian damai yang dibuat oleh para elit, tetapi yang lebih penting adalah pemberdayaan masyarakat yang terpecah oleh konflik untuk membangun perdamaian dari bawah, ditandai dengan pengakuan akan pentingnya aktor lokal dan sektor non-pemerintah dan hubungan dengan pengetahuan dan kearifan lokal.²⁵ Secara umum, tiga elemen penting dalam konsep *peacebuilding*, seperti: (1) rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi masyarakat yang telah menderita akibat konflik bersenjata; (2) terciptanya mekanisme yang berkaitan dengan keamanan, politik dan/atau sosial ekonomi yang dibutuhkan

²⁴ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution, 4th Edition*, (2016): hal. 268

²⁵ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, hal 274

untuk membangun kepercayaan di antara para pihak dan mencegah dimulainya kembali kekerasan; (3) intervensi eksternal (asing, internasional, multilateral atau PBB) untuk membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian.²⁶

Peacebuilding juga menekankan pada pada komitmen pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik di masa depan secara politis bukan militer, dengan kata lain *peacebuilding* berupaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Dalam melakukan upaya *peacebuilding* terdapat strategi yang dapat dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam suatu misi perdamaian. Meskipun strategi *peacebuilding* harus dirancang untuk mengatasi konflik tertentu, parameter luas yang sesuai dengan sebagian besar konflik dapat diidentifikasi.²⁷ Rekonsiliasi dan rekonstruksi adalah kata kunci dalam strategi *peacebuilding*. Tujuan mereka adalah untuk mencegah munculnya kembali kondisi yang menimbulkan konflik bersenjata. Karena itu, manfaat dari *peacebuilding* bergantung pada kemampuannya untuk mengubah situasi potensial atau konflik yang sebenarnya menjadi keadaan damai berkelanjutan.

Dalam konflik terbuka, ketegangan dapat meningkat menjadi kekerasan, yang memiliki intensitas tinggi atau dalam bentuk yang berlarut-larut. Namun dalam praktiknya, ketegangan bisa kembali terjadi lagi dan perdamaian yang belum terpenuhi seutuhnya dapat kembali menjadi konflik. Untuk melakukan *peacebuilding* secara efektif maka perlu dilakukan upaya yang juga efektif dalam menjalankannya. Dalam penelitian berjudul "*Building Peace in War-Torn*

²⁶ Charles-Philippe David, *Does peacebuilding Build Peace?*, (2002): hal. 20

²⁷ Michael W. Doyle and Nicholas Sambanis, *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations*, (2006): hal. 63

Societies: From Concept to Strategy”, Jeroen de Zeeuw menyatakan ada beberapa indikator yang dapat dilihat untuk melakukan upaya peacebuilding dalam membangun perdamaian berkelanjutan, diantaranya:²⁸

1. Reformasi Pemerintahan

Dalam suatu kondisi konflik yang berkepanjangan, dapat menunjukkan adanya kegagalan sistem politik yang tidak dapat melakukan fungsi-fungsi tata pemerintahan, sehingga menghasilkan pemberontakan politik. Oleh karena itu, dalam melakukan peacebuilding, bukan mengarah ke kondisi sebelum konflik terjadi, tetapi untuk memperbaiki kondisi yang terjadi sebelumnya. Dalam melakukan reformasi pemerintahan, merupakan hal yang sangat penting sebab dapat menciptakan kapasitas kelembagaan dan keamanan yang diperlukan untuk mencegah konflik kembali terjadi.

Dalam kasus lain, strategi ini merupakan tindakan peningkatan kapasitas, yang bertujuan memperbesar dan meningkatkan kemampuan, kredibilitas dan legitimasi sistem politik baik di dalam pemerintah maupun di antara organisasi masyarakat sipil. Secara umum, lembaga pemerintahan harus didasarkan pada supremasi hukum, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dan beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam pedekatan ini, adanya mekanisme politik yang mampu merepresentasikan, mengatur dan terutama menyelesaikan kepentingan pihak berkonflik adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam melakukan peacebuilding.

²⁸ Jeroen de Zeeuw, “Building Peace in War-Torn Societies: From Concept to Strategy”. Netherlands Institute of International Relations. Hal. 19

2. Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR)

Melucuti, mendemobilisasi, dan mengintegrasikan kembali pihak yang berkonflik ke dalam masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi penting bagi pencegahan konflik kembali terjadi, karena mereka berada dalam posisi 'kuat' untuk merusak proses perdamaian di tahap selanjutnya jika masih terpisah-pisah. Dalam prosesnya DDR, membutuhkan waktu setidaknya tiga hingga empat tahun untuk menyelesaikannya, terdiri dari empat fase didalamnya yaitu; pengabungan, pemecatan, reinserti jangka pendek, dan reintegrasi jangka panjang.

Dalam fase pertama, para pihak yang berkonflik dikumpulkan di suatu daerah dan kemudian diberi kebutuhan dasar sehari-hari seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, sanitasi, dan fasilitas kesehatan, dengan tujuan untuk memastikan jumlah mereka dan melucuti senjata yang ada. Setelah waktu yang terbatas, biasanya dalam satu tahun, tentara dipulangkan dan dibawa pulang ke kediamannya masing-masing.

Fase berikutnya mencakup periode transisi dimana mereka dapat meninggalkan kamp-kamp penampungan dan memulai kehidupan sipil. Selain itu, mereka juga akan dikirimkan bahan-bahan perumahan, persediaan dasar pertanian seperti benih dan alat-alat dan uang tunai lainnya dan pembayaran dalam bentuk barang dimaksudkan untuk menyediakan jaring pengaman dan insentif bagi veteran perang dan keluarga mereka yang memilih untuk memulai kehidupan yang 'normal' kembali.

Fase reintegrasi harus memasukkan para veteran dan keluarga mereka ke dalam masyarakat sipil lagi dan menjadikan mereka mandiri secara finansial dengan mendaftarkan mereka ke dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan

pendapatan. Kegiatan reintegrasi terdiri dari pelatihan kejuruan, konseling, skema kredit dan akses untuk mendapatkan tempat tinggal.

Yang menjadi poin penting dalam proses DDR adalah fase-fase tersebut harus diselesaikan secara berturut-turut agar proses ini berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, jika program reintegrasi tidak diiringi dengan pelucutan senjata, kemungkinan besar mereka tidak tertarik pada prospek kedepannya dan memungkinkan adanya peluang dengan melanjutkan pertempuran atau terlibat dalam segala macam kegiatan kriminal.

3. Reformasi Sektor Keamanan

Dalam hal ini mereformasi lembaga-lembaga sektor keamanan yang bertanggung jawab untuk pertahanan terhadap ancaman eksternal, pemeliharaan hukum dan ketertiban, dan mengawasi pasukan keamanan sangat penting dalam memulihkan kepercayaan dan kredibilitas yang harus dimiliki masyarakat lokal dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Ini adalah salah satu alasan mengapa pihak internasional memusatkan perhatiannya pada apa yang disebut reformasi sektor keamanan. Selain itu, penyediaan keamanan yang memadai sangat penting dalam manajemen konflik.

Situasi di negara-negara demokrasi dan pasca konflik yang baru muncul diperumit oleh kenyataan bahwa mereka harus berhadapan dengan masalah mendasar dalam membangun tradisi kontrol sipil, serta pembentukan institusi untuk pemerintahan yang demokratis, di bawah keadaan ketidakstabilan politik. Karena itu, dalam reformasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dalam kondisi seperti itu dapat menjadi suatu hal yang cukup berbahaya jika sektor keamanan tidak ditangani secara memadai atau dimasukkan dalam

proses membina mekanisme dialog politik, mereka dapat berkembang secara lambat. Dalam skenario terburuk, mereka tetap berada di luar kendali politik dan sipil. Karena itu, program pembangunan ditujukan pada perbaikan dalam aturan dan hukum, mengawasi angkatan bersenjata, meningkatkan kemampuan keamanan dan meningkatkan kinerja badan pengawas keamanan seperti kementerian pertahanan maupun polisi.

4. Pemilu Pasca-konflik

Pemilu dapat memberikan kesempatan dalam melakukan reformasi sistem politik di masyarakat yang telah mengalami konflik dan membuatnya lebih responsif dan sah secara politis terhadap para pemilihnya. Pada poin ini terdiri dari adanya pemilih dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu, serta pengembangan infrastruktur pemilu termasuk pembentukan komisi pemilu independen. Disisi lain ada efek negatif yang dimiliki pemilu dan penciptaan sistem pemerintahan baru terhadap keseimbangan posisi politik yang berbeda-beda, penting untuk membuat penilaian terhadap waktu pemilihan yang tepat di kondisi yang tidak stabil. Pemilihan umum pasca-konflik hanyalah bagian dari proses rekonsiliasi nasional dan gerakan politik yang lebih luas menuju demokrasi multipartai.

5. Hak Asasi Manusia

Dalam kondisi konflik yang berkepanjangan, masyarakat pasti merasakan ketakutan dan kecemasan akan hak-haknya sebagai manusia, oleh karena itu penting untuk menegakan dan meningkatkan hak asasi manusia di masyarakat dan juga negara. Dalam point ini perlu adanya investigasi tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi selama konflik dan mereformasi lembaga-lembaga yang terlibat

adalah prasyarat bagi pemerintah mana pun yang berusaha mengembalikan legitimasi, kredibilitas, dan ketidakberpihakannya. Selain itu, jika hak asasi manusia tidak bisa ditegakkan dan dilindungi dengan baik, maka rekonsiliasi sosial di tingkat masyarakat akan sulit di capai.

6. Masyarakat Sipil

Untuk percepatan *peacebuilding* dengan lembaga pengelola konflik yang sesuai juga melibatkan masyarakat sipil, dimana masyarakat sipil dapat mewakili konstituensi lokal mereka dalam proses pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai pengawas untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan perdamaian internasional, kita perlu pemahaman yang lebih baik tidak hanya tentang serangkaian tugas kompleks yang harus dilakukan tetapi juga tentang berbagai aktor dan peran mereka dalam mengubah masyarakat yang dilanda perang.

Dengan menggunakan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Jaroon de Zeeuw peneliti melihat bagaimana upaya UNMISS dalam melakukan mandate *peacebuilding*nya di South Sudan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui berbagai media.

Jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan upaya *peacebuilding* UNMISS pada konflik di Sudan Selatan secara deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diangkat dengan lebih rinci melalui penjelasan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi atau negara.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti memberikan batasan terhadap penelitian ini berdasarkan waktu, yaitu sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 untuk melihat upaya *peacebuilding* UNMISS di Sudan Selatan. Tahun 2011 menjadi tahun awal UNMISS mendapatkan mandat resolusi DK PBB no. 1996 dengan jangka waktu satu tahun. Namun, karena kondisi konflik yang masih tidak stabil dan konflik kembali terjadi, PBB kembali memperpanjang masa operasional UNMISS. Hingga akhirnya pada tahun 2013 konflik memuncak di Sudan Selatan, UNMISS pun terus berupaya melakukan *peacebuilding*. Tahun 2019 dijadikan batas penelitian sebab konflik sudah cukup stabil dan mandat UNMISS di Sudan Selatan akan berakhir pada tahun 2020, sehingga peneliti melihat tahun 2019 menjadi tolak ukur bagaimana upaya UNMISS dalam melakukan *peacebuilding* di Sudan Selatan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah UNMISS dalam melakukan *peacebuilding*. Selanjutnya, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam hal ini yang menjadi unit eksplanasi adalah konflik di Sudan Selatan.

Sementara itu, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari objek kajian yang diteliti atau dianalisis. Tingkat analisis penelitian ini berada pada level negara. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNMISS di Sudan Selatan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *library research* atau studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Peneliti kemudian mengumpulkan fakta dan data-data tertulis dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber tersebut berupa buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah dan organisasi internasional, dan situs-situs internet yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan adalah terkait dinamika yang terjadi di Sudan Selatan, baik setelah referendum kemerdekaan hingga awal mula konflik terjadi di Sudan Selatan. Selain itu penulis juga menggunakan dokumen-dokumen seperti resolusi Dewan Keamanan PBB untuk UNMISS yang di dalamnya terdapat mandat-mandat UNMISS dari tahun ke tahun. Selain itu peneliti juga menggunakan artikel berita dan *report* yang berhubungan dengan UNMISS terkait tugasnya selama di Sudan Selatan dan juga menggunakan situs resmi untuk membantu peneliti melihat upaya *peacebuilding* yang telah dilakukan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti melakukan analisis data melalui beberapa tahap. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data-data dan juga fakta untuk mendukung pertanyaan penelitian nanti. Data yang diperoleh dari

berbagai sumber sekunder kemudian direduksi, dijabarkan pada unit-unit dan kemudian disusun ke dalam pola dan memilih yang mana yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang ada sehingga didapatkan kesimpulan dan verifikasi.

Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi, data-data terkait upaya UNMISS dalam melakukan *peacebuilding* nantinya diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dituliskan oleh peneliti. Dari data yang telah didapatkan, penulis juga menjelaskan konflik yang terjadi di Sudan Selatan beserta dinamika yang terjadi di Sudan Selatan, lalu data tersebut diinterpretasi dengan indikator yang dijelaskan oleh Jeroen de Zeeuw, yang digunakan untuk melihat upaya serta kondisi yang terjadi dan diterapkan dengan indikator-indikator yang ada. Kemudian peneliti mengelaborasikannya dengan data sehingga dapat dilihat bagaimana upaya *peacebuilding* yang telah diterapkan oleh UNMISS dengan menggunakan indikator yang dijelaskan Jeroen de Zeeuw.

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UNMISS dalam melakukan *peacebuilding* di Sudan Selatan. Peneliti pada akhirnya dapat menalisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dituliskan oleh peneliti sebagai hasil dari penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, studi pustaka sebagai bahan rujukan dan pembandingan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisa dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB II KONFLIK SUDAN SELATAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai konflik yang terjadi di Sudan Selatan mulai dari Sudan Selatan merdeka, hingga konflik kembali terjadi dan memuncak.

BAB III UNITED MISSION IN SOUTH SUDAN (UNMISS)

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai United Mission in South Sudan (UNMISS) yang memiliki peran signifikan dalam operasi dan misi-misi perdamaian yang ada di Sudan Selatan, serta menjelaskan bagaimana UNMISS bisa dimandatkan oleh UN Department of Peace Operations untuk melakukan *peacebuilding* di Sudan Selatan.

BAB IV UPAYA *PEACEBUILDING* OLEH UNMISS DI SUDAN SELATAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil analisis mengenai upaya UNMISS dalam mewujudkan *peacebuilding* berkelanjutan di Sudan Selatan yang dikategorikan menjadi enam bagian, yaitu; reformasi birokrasi; *disarmament, demobilization, and reintegration*; reformasi sektor keamanan, pemilu pascakonflik, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan terkait topik penelitian serta saran peneliti sebagai hasil dari penelitian.

